



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2009 - 2010
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke – 21 (dua puluh satu)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Senin, 15 Februari 2010
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 09.20 s.d 17.30 wib
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: Membahas kesiapan infrastruktur dalam mengantisipasi potensi ancaman banjir di Jabodetabek.
Ketua Rapat	: 1. Ir. Taufik Kurniawan, MM 2. Ir. H. Mulyadi
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Dirjen Bangda (mewakili Mendagri), Deputi III BPN (mewakili Kepala BPN), Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Sekda Prov. Jawa Barat (mewakili Gubernur Jawa Barat) beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 09.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah membahas kesiapan infrastruktur dalam mengantisipasi potensi ancaman banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
3. Ketua mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (mewakili Mendagri), Deputi III BPN (mewakili Kepala BPN), Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Sekda Prov. Jawa Barat (mewakili Gubernur Jawa Barat) untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua mempersilakan anggota Komisi V untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mendesak Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Banten dan Pemprov. Jawa Barat beserta Kabupaten/Kota terkait, untuk menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur sebagai acuan bagi pembangunan dan pengembangan di wilayah tersebut dan melakukan penegakan hukum pada setiap alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
2. Komisi V DPR RI mendukung upaya Pemerintah dan Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Banten dan Pemprov. Jawa Barat, untuk segera menyelesaikan program Kanal Banjir Timur, normalisasi sungai-sungai termasuk pengerukan, perbaikan pintu-pintu air, rehabilitasi situ dan waduk, konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang dan penyediaan RTH, sumur resapan, memperbanyak titik biopori, pengendalian pemanfaatan air tanah, melaksanakan program pemukiman kembali (*resettlement*) penduduk di bantaran sungai dan meningkatkan upaya pencegahan pembuangan sampah di bantaran/badan sungai, didukung dengan kontrak berbasis kinerja, serta sosialisasi berbasis masyarakat.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri untuk mempertimbangkan pembentukan Badan Penanggulangan Banjir di Jabodetabekpunjur, secara terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik lintas sektor maupun lintas wilayah.
4. Komisi V DPR RI akan membentuk Tim Panitia Kerja (Tim Panja) untuk mendalami permasalahan penanganan banjir di Jabodetabekpunjur dan menemukan solusi yang komprehensif dan bersifat jangka panjang.
5. Komisi V DPR RI mendesak Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Banten dan Pemprov. Jawa Barat untuk segera menyelesaikan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sebagai acuan di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Komisi V DPR RI sepakat dengan Pemerintah dan Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Banten dan Pemprov. Jawa Barat untuk bersama-sama berupaya meningkatkan alokasi anggaran APBN/APBD terkait dengan upaya penanggulangan Banjir Jabodetabekpunjur.
7. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan untuk koridor Kanal Banjir Timur sesuai dengan rencana.
8. Komisi V DPR RI mendukung upaya Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mempercepat persiapan pembuatan RUU Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan/ RUU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

+

Jakarta, 15 Februari 2010

KETUA RAPAT,

ttd

IR. H. MULYADI

